

Dampak Populisme Agama dalam Pemilu Kepala Daerah: Pengalaman Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2007-2017

Wasisto Raharjo Jati

Pusat Riset Politik – Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan. Email: wasisto.raharjo.jati@brin.go.id

Abstrak

Populisme agama menjadi kata kunci penting dalam membahas pola kebangkitan politik Islam kontemporer. Absennya kemenangan partai politik Islam sebagai pemenang pemilu di Indonesia paska reformasi menjadikan populisme menjadi pilihan logis dalam menyampaikan aspirasi mengatasnamakan umat Islam. Hal ini setidaknya terjadi pada pemilu Gubernur DKI kontemporer yang dimulai sejak 2007 hingga 2017. Populisme agama menjadi poin penting dalam memberikan narasi penting yang berpengaruh kepada pemilih maupun kandidat yang akan maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Tulisan ini akan berusaha mengelaborasi lebih lanjut mengenai transformasi populisme agama yang berlangsung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Adapun metode riset yang digunakan metode riset campuran berbasis studi lapangan dan juga studi kepustakaan. Hasil riset ini memperlihatkan bahwa dampak populisme agama dalam pemilu kepala daerah menjadikan kompetisi elektoral bertensi lebih tinggi. Terlebih lagi ketika di ruang publik, populisme agama berdampak pada labelisasi hitam dan putih yang berdampak pada relasi sosial.

Kata Kunci: agama dan politik, populisme agama, Jakarta, pemilu, polarisasi

Abstract

Religious populism is a keyword in discussing the pattern of contemporary Islamic political revival. The absence of victory among Islamic political parties in post-reformation Indonesia has made populism a logical choice in conveying aspirations on behalf of the Muslim community. This is at least the case in the contemporary DKI gubernatorial election which started from 2007 to 2017. Religious populism is an important point in providing an important narrative that influences voters and candidates who will run in the DKI Jakarta gubernatorial election. This study attempted to further elaborate on the transformation of religious populism that took place in the recent election for Governor of DKI Jakarta. The research method used was a mixed research method based on field studies and also literature studies. The results of this research showed that the impact of religious populism in regional head elections made electoral competition more intense. Most importantly, when it comes to the public spaces, religious populism caused the social segmentation "black" and "white" that affects daily social interaction.

Keywords: religion and politics, religious populism, Jakarta, election, polarization

* Naskah diterima September 2023, direvisi Oktober 2023, dan disetujui untuk diterbitkan November 2023

<https://doi.org/10.47655/dialog.v46i2.752>

Dialog, 46 (2), 2023, 255-268

<https://jurnaldialog.kemenag.go.id>, p-ISSN: 0126-396X, e-ISSN: 2715-6230

This is open access article under CC BY-NC-SA-License

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Pendahuluan

Tinjauan penelitian mengenai populisme beragama yang dilakukan oleh para sarjana sosial Indonesia masih belum banyak. Secara garis besar, tema kajian populisme sendiri lebih fokus pada pemilu DKI 2017 maupun juga pemilu 2019. Padahal populisme sendiri secara akar gerakan sudah muncul sejak tahun 2007 yang bermula dari Pemilu langsung Gubernur DKI pertama. Oleh karena itulah riset ini berupaya untuk meninjau kembali populisme beragama yang dimulai dari kasus pemilukada DKI Jakarta yang secara langsung dilakukan pada tahun 2007.

Populisme menjadi kata kunci penting dalam membahas konstelasi politik di Indonesia selama kurun waktu 2016–2020. Hal itu menandai adanya pengaruh agama yang cukup kuat dalam urusan politik praktis di Indonesia (Menchik, 2019). Beberapa studi terkini menunjukkan adanya intensitas relasi agama dan politik yang berujung kepada populisme Islam belakangan ini (Jayanto, 2019; Kusumo & Hurriyah, 2018; Margiansyah, 2019; Nuryanti, 2020). Namun demikian hal yang menjadi celah riset yang menjadi tema riset ini adalah soal trajektori populisme yang khas ala Indonesia. Banyak periset lebih banyak menggunakan pendekatan teori dari luar negeri tentang populisme untuk menguji populisme di Indonesia (Martin van Bruinessen, 2021). Hal tersebut yang kemudian mendorong riset ini untuk memperlihatkan sisi populisme yang muncul di Indonesia.

Hal pertama yang bisa ditelusuri adalah munculnya gelombang hijrah oleh kelas menengah muslim kontemporer. Hijrah sendiri pada dasarnya upaya untuk menjadi lebih baik dengan mengadopsi serius nilai agama Islam (Abbas & Qudsy, 2019). Namun pada realitanya, hijrah cenderung menciptakan pemahaman agama yang eksklusif sehingga kemudian bisa dimobilisasi secara politis (Annisa, 2018). Konstruksi hijrah yang menekankan religiusitas secara privat kemudian didorong secara politis ketika pemilu (Farchan & Rosharlianti, 2021). Hal tersebut yang berdampak munculnya pemilih islamis dalam setiap even pemilu baik itu nasional maupun lokal (Hamudy &

Hamudy, 2020; Qomaruzzaman & Busro, 2021; Sunesti et al., 2018).

Selain halnya hijrah, populisme Islam bisa disimak pula dari kebutuhan pengarusutamaan nilai-nilai agama dalam ruang publik. Hal tersebut dipengaruhi kuat gelombang religiusitas yang terus menguat pasca 1999 di kalangan masyarakat (Menchik, 2016). Dengan kata lain, ada aspirasi untuk menjadikan Islam sebagai agama sipil yang norma dan prinsipnya juga mengikat komitmen pemeluk agama lainnya (Schnabel & Hjerm, 2014). Beberapa studi telah memperlihatkan bahwa intensifnya pengarusutamaan nilai agama itu kemudian berujung pada aksi intoleransi pada umat lain (Cahyo Pamungkas, 2018; Fealy, 2016; Fealy & Ricci, 2019). Adapun populisme Islam yang berlangsung itu juga merupakan embrio dari aksi intoleransi yang kemudian dianggap sebagai hal yang “normal” secara sosial (Fitriani, 2020; Fossati, 2019).

Pada akhirnya kemudian munculnya populisme yang berlangsung justru berdampak pada demokrasi di Indonesia. Penetrasi agama yang kian intensif memungkinkan munculnya oknum atau kelompok yang mengatasnamakan agama dalam politik praktis (Mujani, 2020). Fakta tersebut secara langsung berdampak pada kualitas pemilih Indonesia yang pada umumnya sudah mau bertransformasi menjadi pemilih rasional (W. R. Jati, 2022). Dengan demikian, menguatnya gelombang populisme agama ini pulalah yang akan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia untuk ke depannya (Mietzner, 2019; Mujani & Liddle, 2021; Pepinsky et al., 2018; Warburton & Aspinall, 2019). Oleh karena itulah, penting kiranya bagi kita untuk mengulas mendalam mengenai populisme agama terutama dalam kasus Jakarta.

Populisme agama menjadi kata kunci utama dalam membahas konstelasi politik Indonesia kontemporer. Istilah tersebut bisa mengandung banyak makna. Hal itu bisa bermakna yang pertama yakni mobilisasi massa terutama pemilih muslim, yang kedua bermakna kebutuhan akan pemimpin yang seiman. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan akan pengarusutamaan aspirasi

umat Islam. Ketiga makna populisme agama setidaknya mengalami transformasi isu dan kepentingan utamanya yang terjadi di Jakarta. Hal ini setidaknya memperlihatkan bahwa populisme bukanlah hal yang baru dalam kajian politik Indonesia.

Adapun yang mendasari transformasi populisme agama di Indonesia sebenarnya adalah kebutuhan agama yang semakin meningkat politik khususnya politik elektoral. Hal tersebut sebenarnya merupakan refleksi dari absennya ideologi dalam diskusi ruang publik mendorong masyarakat untuk melihat politik secara jangka pendek daripada jangka panjang. Kondisi tersebut yang menjadikan alasan populisme agama terus tumbuh dan terus bertransformasi hingga saat ini.

Kecenderungan populisme di Indonesia dapat tergambarkan sejak Pilkada DKI Jakarta dimulai pada tahun 2007 dan terakhir pada tahun 2017. Kecenderungan tersebut disebutkan dalam tiga bentuk politik yaitu etnisitas (2007), tokoh (2012), Islam (2017). Berkaca dari tiga kecenderungan pola tersebut, dapat dikatakan bahwa populisme beragama berbasiskan pada identifikasi sebagai bagian dari mayoritas atau minoritas. Adapun kelompok minoritas ini yang acap kali menjadi kambing hitam dari segala permasalahan yang ada. Minoritas sebagai objek yang terpinggirkan menjadi faktor penentu untuk dianalisis tren populisme di Indonesia. Kelas menengah muslim Indonesia menggunakan populisme berdasarkan level demokrasi jalanan yang memaksakan aspirasinya tanpa garis konstitusional.

Hal penting dalam melihat transformasi populisme agama dalam konteks pemilu Jakarta adalah upaya menjadikan agama sebagai *framing* politik yang adaptif dengan preferensi politik pemilih saat itu. Secara lebih lanjut narasi agama dan politik senantiasa dinamis yang pada akhirnya membentuk identitas politik yang diselaraskan dalam selera memilih pemilih khususnya pemilih muslim Jakarta.

Gagasan populisme dalam kajian politik Indonesia pertama kali digunakan di perhelatan pemilu Gubernur DKI Jakarta utamanya pada kampanye pemilu tahun 2007. Di era pemilu

pertama paska berakhirnya kepemimpinan Gubernur Sutiyoso, Betawi dianggap sebagai identitas populisme yang harus didukung kandidat Betawi sebagai Gubernur Jakarta. Populisme kemudian mengerangkai bahwa menjadi Betawi adalah juga seorang muslim karena mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Hal itu ditunjukkan dengan maraknya kelompok-kelompok Betawi untuk menegaskan diri mereka dalam berbagai gerakan politik, baik itu kelompok kepentingan maupun kelompok penekan.

Adanya pengaruh politik yang mengklaim pemimpin Jakarta harus datang dari Betawi yang mengklaim sebagai Jakarta kelompok etnis pribumi. Sebelum pemilihan langsung tahun 2007, kepemimpinan Jakarta didominasi oleh keduanya Jawa atau tokoh militer untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Kondisi itulah yang dirasakan Betawi kelompok untuk melakukan gerakan informal selama kampanye Pilgub Jakarta 2007. Fauzi Bowo yang didukung oleh kelompok Betawi seperti FBR (Forum Betawi Rempug), Forkabi (Forum Keluarga Betawi).

Pada Pilgub Jakarta 2012, tren populisme bergeser dari etnik ke arah tokoh populis. Hal itu ditunjukkan dalam diri Jokowi yang digambarkan berlatar belakang non-militer. Meskipun Fauzi Bowo dan pasangannya Nachrowi Ramli masih memainkan isu populisme agama berbasis etnisitas dan agama, tampaknya narasi populisme yang ditampilkan tidak begitu kuat. Hal ini dikarenakan penantangannya yakni Joko Widodo juga beragama Islam. Hal ini yang mengakibatkan pergeseran makna populisme Islam yang semula menautkan etnisitas dengan agama kini bergeser pada penokohan. Hal tersebut berdampak pada penokohan Joko Widodo sebagai elit yang berbasis non Jakarta dapat berkuasa sebagai Gubernur non etnis Betawi. Dapat dikatakan bahwa populisme berbasis figure tersebut yang berkembang tren terkini yang berdampak pada efek bola salju di seluruh pilkada.

Munculnya sosial media massa dan sosial media mengambil faktor penting untuk menarik orang untuk memilih Jokowi (Hamid,

2014). Namun demikian pada perhelatan pemilihan Gubernur DKI pada 2017, tren revivalisme Islam kembali merajai sebagai faktor penentu populisme Islam. Ahok dianggap sebagai musuh bersama Islam sehingga harus disingkirkan kursi gubernurnya. Tren tersebut secara dramatis mengubah tren populisme sebelumnya seperti etnisitas dan figur dalam kampanye politik sebelumnya. Hal itulah yang kemudian membangkitkan semangat ummah sebagai identitas kolektif. Pola populisme berbasis ummah ini yang kemudian menggeser etnisitas maupun figuritas yang selama ini menjadi *framing* populisme agama (Azharhany et al., 2020).

Segaris dengan yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, tulisan ini berusaha untuk mengelaborasi relasi agama dan politik dalam membentuk populisme Islam di Indonesia. Dengan mengambil kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta dari tahun 2007 hingga 2017, studi ini ingin memperlihatkan bagaimana populisme agama kemudian bisa bertransformasi hingga kemudian menghasilkan identitas ummah.

Metode Penelitian

Pendekatan riset yang digunakan dalam tulisan ini adalah paradigma riset campuran (*mixed method*). Paradigm ini secara empiris berbasiskan pada dua hal utama yakni studi lapangan dan metode arsip & kepustakaan. Secara garis besar, studi lapangan dilakukan di Jakarta mulai dari bulan April hingga Desember 2017. Adapun studi lanjutan dilakukan di Canberra, Australia mulai 2019-2020. Studi lapangan tersebut pada dasarnya wawancara dan diskusi dengan berbagai pihak mulai dari tim sukses, lembaga survey yakni Charta Politika dan Politica Wave, dan juga masyarakat sipil lainnya. Sedangkan studi kepustakaan sendiri lebih berbasiskan kepada pengumpulan informasi relevan misalnya saja hasil survey, kajian setema sebelumnya, maupun notulensi dengan para pakar terkait.

Hasil dan Pembahasan

Agama dan Politik: Populisme Beragama

Relasi agama dan politik dalam menghasilkan populisme beragama sebenarnya adalah bentuk bergesernya politik Islam yang sebelumnya ada di tengah kini pendulumnya bergeser ke arah kanan. Adapun ekspresi khilafah sebenarnya juga bukan ekspresi politik Islam yang kanan, namun kemudian ide ini kemudian bergeser menuju pada konteks ummah yakni masyarakat Islam.

Munculnya ummah sebagai basis dasar populisme beragama itu memang didasari oleh berbagai macam faktor, baik itu internal maupun eksternal misalnya saja 1) absennya partai politik berbasis Islam sebagai pemenang pemilu paska reformasi, 2) penguatan peran ulama dalam ruang publik kemasyarakatan, 3) adanya kebutuhan untuk menjadikan Islam sebagai agama sipil. Adapun faktor eksternal lebih berpusar pada konstelasi geopolitik yang berkembang di Timur Tengah misalnya saja munculnya Erdogan di Turki maupun gelombang Arab Springs yang melawan rezim otoriter (Martin van Bruinessen, 2021).

Berbagai macam faktor internal maupun eksternal itulah yang membuat narasi populisme beragama yang berkembang di Indonesia menjadi ideologi baru bagi pemilih muslim. Hal ini dikarenakan populisme beragama sendiri berkembang menjadi ideologi bagi pemilih muslim. Hal ini yang kemudian berkembang menjadi preferensi politik, baik di masa pemilu maupun interaksi sosial sehari-hari.

Munculnya populisme beragama sebagai ideologi baru sebenarnya memayungi berbagai macam ekspresi politik dari pemilih muslim. Mulai dari Islamisme berbasis konservatif-salafi, moderat, hingga Islam progresif yang berbasis isu keadilan dan kesejahteraan (Wasisto Jati et al., 2022). Hal itulah yang kemudian membuat populisme beragama ini menjadi rumah besar umat Islam secara politis. Fungsi serupa yang sebenarnya pernah dijalankan oleh Partai Masyumi di era 1950-1960 an. Sejauh ini Masyumi yang pernah menjadi partai politik berbasis Islam dominan (Madinier, 2015). Namun setelah pembubaran Masyumi oleh

pemerintahan Orde Lama, representasi politik Islam dalam sistem elektoral kemudian terpecah dalam berbagai partai Islam hingga saat ini.

Beragamnya partai politik berbasis Islam tersebut tidak juga serta mampu menyatukan suara pemilih Islam. Malahan yang ada adalah jumlah perolehan suara para partai berbasis Islam tak ada yang mampu menjadi pemenang pemilu paska 1999. Kondisi tersebut yang kemudian menimbulkan kekecewaan umat muslim sehingga mereka kemudian memilih jalur informal dengan populisme Islam.

Selain halnya didasari atas kekecewaan elektoral, populisme beragama juga muncul karena pengalaman traumatis di masa pemerintahan Orde Baru misalnya peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 dan Tragedi Talangsari di tahun 1989. Kedua hal tersebut secara kurang lebih menjadi semacam pengingat atau fondasi berkembangnya pengarusutamaan kepentingan umat muslim, terutama di ruang publik. Dengan kata lain, sebenarnya narasi “ketertindasan” yang menjadi dasar populisme beragama boleh jadi bersumber dari kedua peristiwa tersebut, di samping pula faktor ketimpangan ekonomi.

Maka berkaca dari narasi tersebut, populisme beragama sebenarnya merawat memori tersebut yang kemudian dikontekskan dengan kondisi terkini. Terlebih lagi dengan adanya keterbukaan paska kejatuhan 1999, yang kemudian memberi ruang besar bagi kebangkitan politik Islam melalui ekspresi populisme beragama tersebut di ruang publik.

Jakarta menjadi contoh penting dari inkubasi agama dan politik sehingga menghasilkan populisme agama. Hal ini setidaknya bisa terlacak dari berkaitan dengan berbagai macam faktor misalnya etnisitas maupun figuritas. Hal ini yang berimplikasi kepada berkembangnya narasi agama menjadi faktor pengikat dalam populisme agama.

Adapun peran kelas menengah muslim menjadi faktor utama dalam membentuk dan menggerakkan populisme agama. Kemunculan kelompok masyarakat menurut berbagai literatur merupakan bentuk muslim baru, muslim tanpa tarekat, maupun muslim modern.

Ketiga terminologi menunjukkan adanya konstelasi dan dialog agama dan politik yang menghasilkan kelompok Islam yang berbeda dengan kelompok muslim yang telah eksis sebelumnya, baik itu berbasis pengajian maupun tarekat yang ada (Kuntowidjojo, 1986).

Populisme beragama yang berbasis di Jakarta sebenarnya banyak mengambil inspirasi dari pengalaman populisme yang berkembang di luar negeri (Y. Rizal, wawancara langsung, 2017; Y. Wijaya, wawancara langsung, 2017). Misalnya konteks pembenturan “mereka” dan “kita” (Madinier, 2015). Secara lebih lanjut, pembenturan tersebut berkelindan dengan konteks sebagai *pure people* sebagai aktor yang berdaulat dalam demokrasi. Makna *pure people* inilah yang secara simbolik dan nyata memiliki pesan kuat sebagai penjaga demokrasi dan kepentingan politik tertentu. Namun demikian, pesan lain yang bisa ditangkap dari favoritisme identitas pribumi ini adalah bisa jadi makna *pure people* itu malah merepresentasikan orang yang mengaku pribumi (*native people*) sehingga populisme tersebut bukan lagi atas nama aspirasi atas nama rakyat namun bisa jadi malah pribumi. Adanya penyempitan tersebut sebenarnya memiliki pemahaman adanya kepentingan mayoritas yang perlu diakomodasi dan juga ada rasa / persepsi “keterancaman” yang menjadi narasi utama.

Oleh karena itulah, makna pribumi dalam konteks ini adalah kelompok mayoritas dari segi identitas yang justru menjadi minoritas di tanahnya sendiri sehingga memicu gerakan populis. Adanya sikap dan pola perasaan inferioritas tersebut yang kemudian berkembang menjadi faktor pendorong besar dalam populisme beragama. Inferioritas ini pada dasarnya berasal dari ketimpangan ekonomi yang berdampak kepada kelompok tertentu. Kondisi tersebut yang kemudian melahirkan adanya labelisasi dan stigmatisasi kelompok tertentu yang kemudian menghasilkan agama sebagai indikator penting (Hadiz, 2016).

Secara lebih lanjut, makna pribumi yang berkembang dalam populisme beragama di Jakarta selama kurun waktu 2007-2017 ini memang secara tidak langsung menyangkut

Betawi. Kelompok masyarakat Betawi yang notabene selama ini dipinggirkan secara sosial dan ekonomi seiring dengan perkembangan Jakarta secara historis menyediakan fondasi populisme beragama yang selalu berkembang dan berjenjang. Terlebih lagi mayoritas kelompok Betawi ini beragama Islam. Keduanya kemudian berkembang menjadi narasi kuat populisme agama. Setidaknya hal itulah yang terjadi pada pemilu langsung di DKI pada tahun 2007 paska berakhirnya masa Gubernur Sutiyoso.

Mengentalnya populisme beragama yang mengarahkan kepada munculnya sentimen putra daerah menjadi pemantik penting di 2017. Hal itulah yang kemudian menghasilkan adanya kemenangan putra daerah pada pemilu 2007. Dengan kata lain, adanya keterbatasan akses ekonomi yang kemudian membesarkan faktor agama sehingga menguatkan sentimen primordial, baik itu agama maupun etnisitas. Hal tersebut cukuplah berbeda dengan pemilu yang terjadi di tahun 2012. Jika sebelumnya, populisme beragama tersebut lebih mengandalkan pada narasi identitas primordial.

Konteks populisme beragama yang berkembang di Jakarta senantiasa menempatkan narasi pribumi menjadi faktor pengikat utama. Makna pribumi secara lebih lanjut dapat dipahami sebagai kaitannya dengan etnisitas maupun agama yang lebih dulu lama eksis sebelum “mereka” yang dianggap pendatang ditinjau dari kedua identitas tersebut. Selain konteks pribumi menjadi faktor pendorong penting, hal lain perlu digaribawahi adalah soal aksesibilitas yang selama ini masih dianggap timpang. Hal itulah yang menjadi pemantik utama kenapa kemudian munculnya agama menjadi basis populisme beragama.

Hal itu yang berdampak pada pergeseran pola dan aksi populisme beragama yang semula berbasis pada etnis, mulai tahun 2012 mulai berkembang pada narasi umat. Meskipun pada saat itu masih dalam bentuk embrio, narasi umat berkembang secara signifikan. Jika sebelumnya narasi populisme lebih melekat pada figur kini lebih pada gerakan. Hal inilah

yang menjadikan gerakan kolektif menjadi alat penting dalam membaca populisme agama (Z. Qodir, wawancara langsung, 2017). Puncaknya kemudian terjadi pada pemilihan Gubernur DKI pada 2017 silam dimana populisme beragama kemudian mencapai fase puncaknya (Hadiz, 2019). Dengan demikian, sebenarnya populisme beragama yang berkembang di Jakarta sebenarnya adalah bentuk evolusi dari dialog agama dan politik yang membentuk populisme agama.

Maka secara garis besar, perkembangan dialog agama dan poliitk dapat dielaborasi melalui pembahasan tabel berikut ini.

Tabel 1: Evolusi Narasi Populisme Beragama di Jakarta

Periode Pemilu Gubernur DKI	Konteks Agama dan Politik	Narasi Populisme Beragama	Dampak pada Ruang Publik
Pemilu Gubernur DKI 2007	Pemimpin Pribumi	Etnisitas	Penguatan Betawi sebagai identitas politik
Pemilu Gubernur DKI 2012	Pemimpin Satu Identitas	Satu Etnisitas dan Satu Iman	Penguatan kesamaan latar belakang antara pemilih dan kandidat
Pemilu Gubernur DKI 2017	Pemimpin Seiman / Pemimpin Pilihan Ulama	Umat	Labelisasi hitam dan putih di ruang publik

Sumber: diolah dari berbagai macam data

Dengan berkaca pada hasil pembahasan tabel tersebut, evolusi populisme beragama secara cepat dan masif dalam konteks pemilu gubernur Jakarta. Setidaknya kita bisa melihat bahwa fase umat adalah bagian mutakhir dari populisme beragama yang sebelumnya lebih mengandalkan pada narasi primordialisme. Selain itu pula, narasi umat sebagai fondasi populisme beragama dalam konteks politik Indonesia bisa dikatakan sebagai ideologi payung yang mewadahi berbagai macam kepentingan umat islam hari ini.

Terkait dengan membesarnya peran dan aksi umat dalam populisme Islam tersebut tentu juga tak terlepas dari peran ulama dan kelas menengah muslim yang menjadi faktor penting penggerakannya. Keterlibatan ulama dalam politik sebenarnya telah menjadi alasan penguat di balik peran populisme agama di Jakarta.

Terlebih lagi kini ulama juga berperan sebagai pemegang veto politik secara informal terhadap kandidasi figure maupun mobilisasi massa di akar rumput. Oleh karena itulah, bisa disimak adanya mobilisasi massa itu juga tidak terlepas dari peran ulama karena merasa ada “kekecewaan” terhadap hal tertentu. Kondisi tersebut yang kemudian mengoperasionalkan populisme beragama menjadi narasi hidup di ruang publik, terutama ditujukan kepada kelas menengah muslim Indonesia yang menjadi barisan kedua setelah ulama dalam populisme beragama (A. Firdaus, wawancara langsung, 2017.),

Adapun aspirasi ulama yang ditangkap dalam oleh kelas menengah muslim tersebut sebenarnya bagian dari upaya mengakomodasi berbagai kepentingan ada. Hal itulah yang kemudian melahirkan narasi pemimpin seiman maupun pemimpin seagama. Kedua faktor tersebut seolah menegaskan bahwa akar dari segala masalah yang menimpa umat Islam berasal dari keterpilihan pemimpin. Preferensi ini yang kemudian membingkai adanya kebutuhan seagama atau seiman untuk menjadi fondasi penting. Setidaknya hal itu yang terbaca pada pemilu Gubernur DKI 2017 dimana kebutuhan akan kandidat berlatar belakang sama dengan latar belakang mayoritas pemilih menjadi hal yang tidak bisa terelakkan. Dengan kata lain umat memilih umara yang adil dan bisa mengayomi. Begitulah yang bisa dilihat dari narasi besar populisme beragama yang ada di Jakarta tahun 2017.

Populisme Beragama di PilGub DKI 2007 dan 2012

Tahun 2007 merupakan pemilu pertama kepala daerah yang dilangsungkan di Jakarta. Saat itu yang menjadi kontestan adalah Fauzi Bowo melawan Adang Daradjatun dalam Pemilu Gubernur DKI 2007. Adapun beberapa riset yang mengangkat pemilu 2007 lebih menyoroti pada kuatnya narasi etnisitas sebagai embrio awal populisme beragama dalam pilkada Jakarta (Prasetyawan, 2014; Bertrand, 2010). Hal tersebut tentu tidak terlepas dari mulai besarnya pengaruh ormas Jakarta yakni Forum Betawi Rempug (FBR) dan juga Forum

Pembela Islam (FPI). Keduanya menarasikan pemimpin pribumi yang dalam konteks ini dikatakan sebagai satu etnisitas dan satu agama yakni Betawi muslim (Brown & Wilson, 2007; Noor, 2012). Adapun kebutuhan narasi itu juga sebenarnya merespons adanya aspirasi terhadap penerapan nilai dan norma Islam di ruang publik. Maka 2007 tersebut momen penting dalam membaca tahapan awal populisme beragama di Jakarta. Tahapan awal itu memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat sipil menjadi pionir penting dalam perkembangan populisme beragama.

Keterpilihan Fauzi Bowo pada pemilu Jakarta pada tahun 2007 menguatkan arti penting mengenai narasi pribumi dalam perilaku memilih orang Jakarta. Hal inilah yang kemudian coba dilawan oleh Jokowi-Ahok pada pemilu Jakarta tahun 2012 yang mengusung narasi pemimpin populis dengan narasi Jakarta Baru (Hamid, 2014). Dalam konteks ini, narasi populisme beragama yang menekankan soal agama. Hal ini memang terkait dengan karakter pemilih Jakarta yang dinamis dan rasional sehingga tidak terlalu memikirkan soal agama dan etnisitas (Masaaki, 2014). Namun demikian, pengaruh tokoh masyarakat khususnya ulama berperan besar dalam mempengaruhi publik Jakarta terutama soal perdebatan memilih pemimpin non muslim (Hosen, 2016). Hal ini sebenarnya merujuk pada Ahok yang notabene seorang Nasrani dengan beretnis Tionghoa. Oleh karena itulah narasi etnis dan agama tetap tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam pemilu Jakarta 2012. Terlebih lagi para elit politik sengaja memelihara warna politik identitas tersebut demi kebutuhan elektabilitas dan popularitas (Adrian, 2014).

Meskipun pemilu DKI pada tahun 2012 tidak memperlihatkan gerakan aksi jalanan yang masif, namun embrio gerakan sebenarnya sudah muncul lewat munculnya tokoh-tokoh masyarakat yang menguasai mimbar di ruang publik. Hal tersebut sebenarnya menandakan bahwa populisme beragama mulai mengakar lewat mimbar-mimbar.

Populisme Beragama di PilGub DKI 2017

Setelah membahas pola dan aksi populisme beragama yang terjadi di Indonesia terutama dalam konteks Jakarta, tulisan dalam sub bab ini akan berfokus pada pengembangan pola populisme yang berlangsung pada perhelatan Pemilu Gubernur DKI 2017. Pemilu tersebut memiliki dampak yang penting terutama dalam proses dialogis antara agama dan politik sehingga membentuk populisme.

Hal pertama yang perlu digarisbawahi adalah populisme beragama kini menjadi identitas politik bagi pemilih muslim. Terutama bagi mereka yang ingin bertransformasi diri menjadi kelompok penekan maupun kelompok kepentingan. Sebagai contohnya munculnya kelompok 212 yang berkembang menjadi inisiator Aksi Bela Islam. Hingga kini berbagai kelompok tersebut mengambil inspirasi dari gerakan tersebut di level daerah.

Hal kedua yang perlu digarisbawahi dari populisme beragama adalah politisasi agama yang berkembang menjadi ideologi politik. Tentu hal ini yang menjadikan pesan damai agama menjadi terpinggirkan karena digunakan untuk meraih kekuasaan. Terlebih lagi hal itu digunakan sebagai media kampanye yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kondisi tersebut yang menjadikan misi agama dalam politik adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar menjadi tidak tersampaikan.

Poin mendasar dari populisme beragama tentunya adalah pernyataan Gubernur Ahok soal penggunaan ayat kitab suci untuk bahan politis. Mengingat latar belakang gubernur yang merupakan tokoh non muslim (Mietzner & Muhtadi, 2018). Seketika pula faktor tersebut menjadi pemantik mendasar mengenai populisme yang mengemuka di ruang publik.

Dasar paling penting dalam melihat fondasi populisme beragama yang berkembang di Jakarta dan mungkin Indonesia adalah adanya batasan sosio-religius yang perlu dihormati antar sesama pemeluk agama yakni tidak membicarakan kitab suci yang bukan agamanya. Dalam berbagai literatur mutakhir, prasyarat itu menjadi semacam konvensi tidak tertulis paska DKI 2017. Adanya "pelanggaran" tersebut yang menjadikan populisme beragama

mampu mengikat aspirasi muslim lintas kelas dan mazhab (Hadiz, 2018).

Sebelum ada insiden tersebut, ekspresi populisme beragama yang ada sebenarnya lebih mengarah pada aksi-aksi penegakan moralitas ruang publik. Namun dengan adanya insiden Gubernur Ahok itulah yang kemudian menyebabkan ekspresi populisme kemudian berkembang dan merambah ke dunia politik. Dengan kata lain sepanjang tahun 2016-2017, narasi ummah kemudian mengalami penguatan dengan berbagai serangkaian aksi bela Islam maupun bela ulama. Hal itu yang kemudian menjadikan gerakan populisme beragama terlembagakan secara informal di sepanjang tahun 2017 dan kemudian berkembang pula di pemilu presiden 2019.

Hal penting yang perlu digarisbawahi dalam populisme beragama di Indonesia dengan berkaca pada kasus Jakarta adalah tergantung pada isu identitas. Faktor tersebut yang selama ini menjadi pintu masuk berkembangnya populisme beragama di Indonesia. Insiden Ahok dengan Al Maidah tentu menjadi salah satu isu identitas tersebut. Dari situlah kemudian berkembang pada narasi pemimpin seiman dan seagama yang mulai dari Jakarta dan merambah kepada daerah-daerah lainnya. Kedua model narasi populis itulah yang hingga kini menjadi acuan mendasar ketika memperbincangkan preferensi pemilih muslim Indonesia saat ini.

Putaran pertama Pemilihan Gubernur DKI sudah selesai dilangsungkan pada 15 Februari 2017 telah memunculkan dua kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Syaiful Hidayat dan Anies Baswedan – Sandiaga Uno untuk maju dalam putaran selanjutnya. Dari kedua pasang calon tersebut, pasangan Anies-Sandiaga ini yang kemudian lekat beririsan dengan narasi populisme beragama saat pemilihan Gubernur DKI 2017. Terlebih ketika itu, mereka berdua mulai memperkenalkan nama tengah mereka yakni Rasyid dan Salahuddin untuk bisa memikat hati pemilih islamis. Pasangan Basuki – Djarot mengumpulkan perolehan suara sebesar 42,96 persen (2.357.285 juta suara) dan Anies – Sandiaga sebesar 39,97 persen (2.193.350

juta suara). Majunya dua kandidat tersebut dalam putaran kedua tersebut dikarenakan belum adal calon kepala daerah yang mampu meraih perolehan suara lebih dari 50 persen. Sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, "Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih" dan Pasal 11 ayat (2) UU a quo menyebutkan, "Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama." Maka pemilihan putaran kedua menjadi sesuatu esensial untuk dilakukan dalam tahapan berikutnya. Adanya putaran kedua dalam Pilgub DKI 2017 sebenarnya menunjukkan adanya divergensi suara yang cukup pelik di kalangan masyarakat Jakarta. Pilgub DKI 2017 ini sebenarnya mewakili kontestasi tak usai dari pemilu 2014 silam yang ketika trendnya adalah populisme melawan elitisme. Sedangkan Pilgub DKI 2017 kali ini bertemakan antara Ahok-non Ahok, Islam-kafir, maupun juga pribumi-pendatang. Pola pikir biner tersebut yang sebenarnya juga mewakili pembilahan cukup signifikan terhadap kantong pemilih kelas menengah di Jakarta. Pengertian kelas menengah dalam tulisan ini adalah kelompok masyarakat rasional, berpendidikan menengah, dan juga berpendapatan menengah (W. Jati, 2017). Definisi tersebut diambil sebagai payung utama melihat konteks masyarakat Jakarta sebagai pemilih dalam ajang Pilgub DKI 2017 kali ini.

Secara garis besar, ekspresi politik dalam Pilgub DKI adalah yang paling menyedot perhatian nasional. Bukan karena kandidat yang bertarung, namun juga masalah SARA, masalah intoleransi, masalah polarisasi semula laten justru berkembang secara manifest dalam ruang publik (Raharjo Jati, 2022). Ekspresi kekerasan baik verbal maupun non verbal baik di dalam dunia maya maupun dunia nyata menjadi sesuatu yang tidak terelakkan terjadi

hari ini. Dengan mengatnamakan Pilgub DKI, ekspresi politik yang sekarang ini dengan mudahnya menerapkan labelisasi, segregasi, dan bahkan berujung pada praktik separatisasi sosial hanya karena pilihan berbeda saat Pilgub DKI (Nastiti & Ratri, 2018). Kelas menengah Jakarta menjadi simpul penting sebenarnya untuk membaca berbagai macam bentuk trend tersebut yang mewarnai konteks demokrasi di aras lokal.

Trend berpikir biner dalam Pilgub DKI 2017 seolah juga menegaskan bahwa masalah pemenuhan kepentingan, artikulasi identitas, pembentukan ruang ekspresi politik informal penting dibicarakan. Terlebih kelas menengah Jakarta juga bukanlah entitas yang tunggal, melainkan plural yang terbagi atas basis demografi, ideologi, partai, afiliasi, dan lain sebagainya. Artinya membaca kompleksitas perilaku pemilih kelas menengah Jakarta tidak bisa dielaborasi secara teoritis yakni apakah sebagai pemilih parokial, rasional, patrimonial, bahkan delusional. Hal tersebut sekali lagi tergantung pada preferensi memilih kelas menengah Jakarta yang cukup dinamis dari menit ke menit. Dinamika preferensi memilih itu juga terkait dengan bagaimana manajemen isu sosial politik itu dikelola sebagai kawan ataukah lawan. Apalagi ketika media sosial tampil sebagai kreator ulung preferensi memilih politik Indonesia hari ini. Semua berita dan informasi telah dikemas dalam dunia media sosial yang intinya itu menguatkan dan melemahkan publik terhadap pilihan kandidat masing-masing. Oleh karena itulah, kelemahan dan keunggulan kandidat gubernur dalam merespons permasalahan ibukota dan juga solusi yang mereka tawarkan. Manajemen isu menjadi menarik dilihat manakala kampanye model konvensional berbasis ideologi kini mulai ditinggalkan. Meskipun bisa dikatakan sebagai bagian dari infotainment, namun hal tersebut cukup mengena bagi kalangan kelas menengah perkotaan yang berupaya mencari latar belakang kandidat secara menyeluruh. Publik kelas menengah ingin melihat sisi intim dari kandidat yang itu sebenarnya adalah upaya pencitraan instan figur itu adalah bagian dari masyarakat.

Hal menarik sebenarnya terletak pada sebaran suara yang dimiliki oleh kedua pasangan kepala daerah / wakil kepala daerah tersebut yang menunjukkan adanya polarisasi politik dan geopolitik yang signifikan di ibukota. Polarisasi tersebut membentuk adanya enklave sosial di setiap wilayah. Daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat merupakan basis pendukung dari Ahok-Djarot, sedangkan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan adalah basis pendukungnya Anies-Sandi. Sementara Jakarta Pusat merupakan daerah irisan dari basis pendukung kedua kubu tersebut. Terhadap pembilahan spasial tersebut, tentunya menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai karakter demografi setiap wilayah tersebut. Hal tersebut nantinya berkelindan dengan upaya membaca karakter dan perilaku memilih kelas menengah Jakarta dalam Pilgub DKI 2017 kali ini. Karakter demografi kelas menengah yang berada di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara pada dasarnya merupakan daerah kelas menengah atas (*upper middle class*) maupun juga kelas menengah-tengah (*middle-middle class*) yang terdiri atas kalangan industrialis, kaum buruh menengah, orang kaya baru, pekerja profesional, dan juga eksekutif muda. Pandangan politik mereka diletakkan pada pola rasional-pragmatis dengan menitik-beratkan pada kebutuhan (*needs*). Oleh karena itulah, seberapa penting negara berperan mendistribusikan barang publik (*public goods*) dan juga pelayanan publik secara baik. Maka kemudian, kelompok kelas menengah ini berupaya untuk tetap mempertahankan kondisi *status quo* pemerintahan sekarang ini. Mereka berupaya untuk menjadi kelompok pelobi dan juga kelompok kepentingan terhadap akses kebijakan pemerintah daerah. Perilaku memilih dalam kelas menengah ini lebih berupaya melihat secara strategis dan proyektif terhadap Jakarta di masa depan yang membutuhkan kepemimpinan yang *problem solver*.

Sedangkan kelompok kelas menengah berada di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan secara mayoritas ditinggali oleh kalangan kelas menengah bawah (*lower-middle class*) maupun juga kelompok kelas menengah – tengah (*middle-middle class*). Kedua kelompok

tersebut diisi oleh kelompok pelaku ekonomi informal, perantau Ibukota, kalangan Betawi, kalangan buruh kasar, maupun juga kelompok santri kota. Secara garis besar, ikatan emosional mereka sebagai kelas lebih menguat daripada dua kelompok kelas menengah yang berada di kawasan Barat dan kawasan Selatan. Mereka adalah “korban” dari kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak pada mereka dan juga “korban” dari pembangunan perkotaan yang begitu timpang antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kondisi “traumatik” dan juga “problematis” itulah yang mendasari kelompok kelas menengah di kedua wilayah ini berupaya untuk membangun adanya perubahan secara mendasar dan radikal di ibukota. Konteks tersebut yang menguatkan sentimen identitas baik itu agama dan etnisitas menjadi mesin politik kolektif yang berimbas pada terbentuknya kelompok penekan terhadap pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pandangan politik yang terbentuk adalah pembangunan afiliasi dan afinitas terhadap figur politik dengan memiliki latar belakang identitas sama dengan mereka.

Latar belakang agama menjadi indikator penting karena secara psikologis dan teologis akan mengikat suara politik kelas menengah di kedua wilayah ini. Selain itu, sikap militansi dan soliditas menjadi kata kunci penting dalam mengkerangkai perilaku memilih kelompok kelas menengah ini. Adanya pengarusutamaan agama dan etnisitas sebagai modal sosial maupun pula modal kultural menjadi penting dibicarakan oleh kelompok kelas menengah di kedua wilayah ini. Mereka sadar bahwa basis material dan kapital yang dipunyai untuk menghimpun perilaku memilih kolektif tidaklah kuat dibandingkan kelompok kelas menengah di Utara dan Barat. Agama dan etnisitas yang sejatinya adalah masalah privat kemudian dipublikasi menjadi masalah publik yang itu sebenarnya merupakan bagian dari cara menyiasati kurangnya materi.

Adanya dua pembilahan demografi politik tersebut menjadikan kedua figur tersebut dikonstruksikan mewakili pertarungan kepentingan dari kedua kubu kelas menengah tersebut. Ahok dianggap sebagai kalangan kelas

menengah elite Jakarta yang selama ini berkuasa. Meskipun berasal dari kalangan etnis Tionghoa dan Kristen, namun suara kelas menengah tengah-atas justru beralih ke Ahok. Hal tersebut dikarenakan Ahok dianggap menyelesaikan permasalahan klasik ibukota selama ini telah menjadi kanker seperti masalah transportasi publik, pembangunan infrastruktur untuk mengurai kemacetan, pelayanan publik yang lambat, maupun juga jaminan sosial yang tidak bisa diakses secara meluas. Namun di satu sisi, Ahok memiliki kelemahan yakni komunikasi politik yang tidak bagus dan bukan konseptor yang baik. Sedangkan Anies dipilih oleh kalangan kelas menengah tengah dan bawah berkat kepiawaiannya dalam berdiplomasi, kedekatannya dengan ulama, dan juga konseptor yang baik. Sedangkan yang menjadi kelemahan Anies adalah tidak memiliki pengalaman sebagai eksekutor kebijakan.

Seringkali kelemahan dan keunggulan masing-masing kandidat digunakan untuk saling menyerang masing-masing kandidat satu sama lain. Kelas menengah bisa menjadi kelompok partisan, netral, maupun juga *free rider* tergantung dari kepentingan apa yang ingin mereka jalankan dan juga bagaimana kandidat tersebut memberikan perhatian kepada mereka. Kelas menengah partisan bisa kita simak dari berkembangnya para relawan masing-masing kandidat yang terwadahkan dalam Teman Ahok maupun Sahabat Anies-Sandi. Adapun bagi kelompok kelas menengah netral, dapat dikategorisasikan dalam dua bentuk yakni netral-pasif atau netral-aktif. Kelas menengah netral-pasif itu sebenarnya seperti halnya kelas menengah awam yang hanya mengamati perkembangan kekinian dan kemudian menyalurkan suaranya. Sedangkan kelompok kelas menengah netral-aktif akan berupaya berperan sebagai kelompok pengawal Pilgub DKI untuk memastikan demokrasi berjalan aman dan terkendali.

Kedua kandidat ini sebenarnya juga berperan penting dalam menyimbolkan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam benak kelas menengah Jakarta hari ini.

Kesimpulan

Populisme beragama yang berkembang di Indonesia selalu bertransformasi dan adaptif dalam mengikuti konstelasi sosial dan politik yang ada. Dibandingkan dengan akar populisme beragama yang terjadi di luar negeri, populisme beragama di Indonesia masih mengedepankan isu identitas sebagai pemantik dasarnya. Terlebih dengan absennya ideologi dalam perdebatan politik Indonesia menyebabkan populisme beragama menjadi ideologi hidup di Indonesia.

Konteks Jakarta memperlihatkan bagaimana populisme berkembang dan bertransformasi menjadi kekuatan politik. Terlebih lagi ketika yang ditonjolkan kemudian adalah munculnya narasi ummat yang melakukan aksi serangkaian aksi populime beragama mulai dari aksi bela Islam maupun ulama (W. R. Jati, 2017). Terbentuknya narasi ummat sebagai narasi populisme beragama tidak terlepas dari adanya "pelanggaran" batasan sosio religius antara muslim dan non muslim dalam konteks Jakarta. Hal itulah yang kemudian membuat tensi politik populisme beragama menjadi menguat.

Pemilu DKI Jakarta 2017 memperlihatkan bagaimana politisasi identitas dan agama menguat kencang. Kondisi inilah yang kemudian berdampak pada alpanya pesan damai agama sebagai pemersatu dan bukan pemecah belah masyarakat. Pesan damai agama ini kemudian hanyut seiring dengan kuatnya sentiment populisme beragama.

Dengan berkaca pada populisme beragama yang berkembang dan dampaknya pada ruang publik, ada baiknya politisasi narasi identitas dan agama perlu dihindari dalam pemilu ke depan. Pemilu sendiri adalah ajang pertarungan gagasan dan bukan identitas yang berdampak pada labelisasi dan segregasi sosial kemasyarakatan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada tim riset kecil politik "Pilkada DKI 2017" pada Pusat Penelitian Politik LIPI dimana menjadi salah satu anggotanya. Terima kasih pula pada

segenap masukan dan kritikan kolega terhadap penulisan dan penyusunan draf ini.

Daftar Pustaka

- Abbas, S. E., & Qudsy, S. Z. (2019). Memahami Hijrah dalam Realitas Al-Qur'an & Hadis Nabi Muhammad. *Jurnal Living Hadis*; Vol 4, No 2 (2019). <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.2021>
- Adrian, F. (2014). Identitas etnis dalam pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012).
- Annisa, F. (2018). Hijrah Milenial: Antara Kesalehan dan Populism. *Maarif*, 13(1), 38–54.
- Azharghany, R., Siahaan, H., & Muzakki, Akh. (2020). Alliance of Ummah in Rural Areas: A New Perspective on Islamic Populism in Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*; Vol 4, No 4 (2020). <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i4.10476>
- Bertrand, R. (2010). Governor Sutiyoso's "Wars on Vice": Criminal Enterprises, Islamist Militias, and Political Power in Jakarta. In J.-L. Briquet & G. Favarel-Garrigues (Eds.), *Organized Crime and States: The Hidden Face of Politics* (pp. 73–96). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230110038_4
- Brown, D., & Wilson, I. (2007). Ethnicized Violence in Indonesia: The Betawi Brotherhood Forum in Jakarta. Working paper No. 145 July 2007.
- Cahyo Pamungkas. (2018). Mencari Bentuk Rekonsiliasi Intra-Agama: Analisis terhadap Pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 13(1). <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.113-147>
- Farchan, Y., & Rosharlianti, Z. (2021). The Trend of Hijrah: New Construction of Urban Millennial Muslim Identity In Indonesia. *The Sociology of Islam*, 1(2).
- Fealy, G. (2016). The Politics of Religious Intolerance in Indonesia: Mainstream-ism Trumps Extremism? In T. Lindsey & H. Pausacker (Eds.), *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315657356>
- Fealy, G., & Ricci, R. (2019). Diversity and its Discontents: An Overview of Minority–Majority Relations in Indonesia. In G. Fealy & R. Ricci (Eds.), *Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia* (pp. 1–16). ISEAS–Yusof Ishak Institute; Cambridge Core. <https://www.cambridge.org/core/books/contentious-belonging/diversity-and-its-discontents-an-overview-of-minoritymajority-relations-in-indonesia/82E37EA43C005FC297CB0DAF80DA3A1B>
- Firdaus, A. (n.d.). Populisme dan Identitas Muslim [Personal communication].
- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 179–192.
- Fossati, D. (2019). The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 119–148. <https://doi.org/10.1177/1868103419868400>
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press; Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316402382>
- Hadiz, V. R. (2018). Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 566–583. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1433225>
- Hadiz, V. R. (2019). The 'Floating' Ummah in the Fall of 'Ahok' in Indonesia. *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 7(2), 271–290. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/trn.2018.16>
- Hamid, A. (2014). Jokowi's Populism in the 2012 Jakarta gubernatorial Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33(1), 85–109.

- Hamudy, N. A., & Hamudy, Moh. I. A. (2020). Hijrah Movement in Indonesia: Shifting Concept and Implementation in Religiosity. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*; Vol 4, No 2 (2020). <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.2.5784>
- Hosen, N. (2016). Race and Religion in the 2012 Jakarta gubernatorial Election. In *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*. Amazon Kindle. London: Routledge, 180–194.
- Jati, W. (2017). *Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia*. LP3ES.
- Jati, W. R. (2017). Dari Umat Menuju Ummah: Melacak Akar Populisme Kelas Menengah Muslim Indonesia. *Maarif: Jurnal Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, 12(1), 22–36.
- Jati, W. R. (2022). Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer: Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 70–84.
- Jayanto, D. D. (2019). Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU). *Jurnal Filsafat*; Vol 29, No 1 (2019). <https://doi.org/10.22146/jf.41131>
- Kenny, P. (2017). *Populism and Patronage: Why Populists Win Elections in India, Asia, and Beyond*. Oxford University Press. DOI:10.1093/oso/9780198807872.001.0001
- Kuntowidjojo. (1986). The Indonesian Muslim Middle Class in Search of Identity, 1900–1950. *Journal of Imperial and Global Interactions*, 10(1), 177–196.
- Kusumo, R., & Hurriyah. (2018). Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017. *Jurnal Politik*, 4(1), 87–113.
- Madinier, R. (2015). *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party Between Democracy and Integralism*. NUS Press.
- Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 47–68.
- Martin van Bruinessen. (2021). Traditionalist Muslims and Populism in Indonesia and Turkey. *Tashwirul Afkar*, 40(2), 1–27. <https://doi.org/10.51716/ta.v40i2.63>
- Masaaki, O. (2014). Jakartans, Institutionally Volatile. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33(1), 7–27. <https://doi.org/10.1177/186810341403300102>
- Menchik, J. (2016). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge University Press; Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316344446>
- Menchik, J. (2019). Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia. *Asian Studies Review*, 43(3), 415–433. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1627286>
- Mietzner, M. (2019). Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism. *Democratization*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation. 42(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>
- Mujani, S. (2020). Religion and Voting Behavior: Evidence from the 2017 Jakarta gubernatorial Election. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*; Vol 58, No 2 (2020). <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.419-450>
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2021). Indonesia: Jokowi Sidelines Democracy. *Journal of Democracy*, 32(4), 72–86.
- Nastiti, A., & Ratri, S. (2018). Emotive Politics: Islamic Organizations and Religious Mobilization in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 40, 196–221. <https://doi.org/10.1355/cs40-2b>
- Noor, F. A. (2012). *The Forum Betawi Rempug*

- (FBR) of Jakarta: An Ethnic-Cultural Solidarity Movement in a Globalising Indonesia. S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University.
- Nuryanti, S. (2020). Chapter 9 Populism in Indonesia: Learning from the 212 Movement in Response to the Blasphemy Case against Ahok in Jakarta (pp. 165–175). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004444461_011
- Pepinsky, T., Mujani, S., & Liddle, R. W. (2018). Islam and Party Politics. In Piety and Public Opinion: Understanding Indonesian Islam. Oxford University Press.
- Prasetyawan, W. (2014). *Ethnicity and Voting Patterns in the 2007 and 2012 Gubernatorial Elections in Jakarta*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33(1), 29–54. <https://doi.org/10.1177/186810341403300103>
- Qodir, Z. (2017). Populisme Beragama dan Dampaknya bagi Umat [Personal communication].
- Qomaruzzaman, B., & Busro, B. (2021). Doing Hijrah Through Music: A Religious Phenomenon Among Indonesian Musician Community. *Studia Islamika*; Vol 28, No 2 (2021). <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.13277>
- Raharjo Jati, W. (2022). Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*; Vol 26, No 2 (2022): November. <https://doi.org/10.22146/jsp.66057>
- Rizal, Y. (2017). Populisme Beragama dan Dampak Digital [Personal communication].
- Schnabel, A., & Hjern, M. (2014). How the Religious Cleavages of Civil Society Shape National Identity. *SAGE Open*, 4(1), 2158244014525417. <https://doi.org/10.1177/2158244014525417>
- Sunesti, Y., Hasan, N., & Azca, N. (2018). Young Salafi-Niqabi and Hijrah: Agency and Identity Negotiation. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(2), 137–198.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's Democratic Regression. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255–285. JSTOR. <https://doi.org/10.2307/26798854>
- Wasisto Jati, Halimatusa'diah Halimatusa'diah, Syamsurijal Syamsurijal, Gutomo Aji, Muhammad Nurkhoiron, & Riwanto Tirtosudarmo. (2022). From Intellectual to Advocacy Movement: Islamic Moderation, the Conservatives and the Shift of Interfaith Dialogue Campaign in Indonesia. *Ulumuna*, 26(2). <https://doi.org/10.20414/ujis.v26i2.572>
- Wijaya, Y. (2017). Populisme dan Dampak Elektoral [Personal communication].

